

PERLU DITUMBUHKANKAN SIKAP MENTAL PEGAWAI NEGERI DIY UNTUK SADAR ARSIP

Dra. Anna Nunuk Nuryani

Pendahuluan

Pada saat ini peneliti atau pengguna arsip belum mudah menemukan, memperoleh informasi mengenai aktivitas lembaga pemerintah di DIY dengan hanya mengandalkan arsip yang tersimpan di Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY sebagai lembaga kearsipan yang bertanggung jawab melestarikan arsip –arsip yang berasal dari lembaga pemerintah di lingkungan DIY.

Ironis jika di DIY, sebagai daerah yang kaya dan sarat dengan aktifitas sejarah serta penuh dengan dinamika perubahan, tetapi untuk memperoleh informasi tentang aktivitas tersebut masih sulit diketemukan kembali, atau bahkan hilang / musnah hanya karena faktor perilaku manusia.

Sesungguhnya kita mengetahui dan memahami bahwa arsip memiliki arti penting yang dapat digunakan sebagai bukti keberadaan atau sebagai jati diri, namun pengetahuan dan pemahaman itu barangkali belum sampai pada tingkat kesadaran untuk penyelamatan dan pelestarian arsip.

Realita

Apa jadinya apabila aktivitas kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun organisasi tanpa catatan (arsip). Seperti dikatakan Mikland niscaya ia akan kehilangan memory, tanpa kepastian hukum, tanpa sejarah, tanpa kebudayaan, tanpa ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jawaban itu setidaknya memiliki pengertian bahwa sebenarnya arsip mengandung banyak dimensi. Kehadiran arsip dalam setiap aktivitas manusia maupun organisasi dari segala aspeknya sebenarnya dalam status dibutuhkan dan bukan diinginkan.

Hilangnya sebagian bukti – bukti kegiatan pemerintahan di DIY yang merupakan identitas budaya DIY merupakan konsekuensi dari ketidaktersediaan arsip di lingkungan Pemerintah DIY. Hal ini menjadikan kita sulit menunjukkan identitas dan jati diri DIY yang merupakan Citra Daerah yang dapat dikatakan unik, karena di Indonesia DIY adalah hanya satu-satunya wilayah yang ada di Pulau Jawa dan tidak akan kita temukan di wilayah manapun di Indonesia ini.

Sebaliknya secara implisit juga menginsyaratkan, bahwa dengan arsip akan diperoleh memori aktual, terciptanya rekontruksi sejarah yang *reliable* dan *kredibel* baik dalam konteks berlembaga maupun berbangsa.

Kondisi kearsipan di lingkungan Pemerintah DIY pada umumnya masih memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Masih banyak arsip di instansi belum diperlakukan sebagai sebuah informasi yang dibutuhkan penciptanya, sehingga arsip yang diciptakannya seolah layak diperlakukan semauanya, dibiarkan sebagai onggokan sampah. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam memperlakukan arsip –arsip yang diciptakannya. Apa yang diperoleh dari arsip apabila kekeliruan penyelenggaraan kearsipan dinamis di Pemerintah DIY masih terjadi ? Apa upaya yang kiranya dapat dilakukan ?

Terjadinya kekeliruan penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah khususnya, di lingkungan Pemerintah DIY diimungkinkan oleh beberapa faktor :

1. Pelaksanaan kearsipan dinamis belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan manajemen, terutama dalam pengambilan keputusan organisasi.
2. Lemahnya kesadaran terhadap informasi, nilai dan fungsi arsip
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggar amanat UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok kearsipan

Pengalaman yang ada memberi pelajaran bahwa kebenaran sebagian rekonstruksi sejarah Indonesia yang selama ini dinilai mengandung manipulasi sejarah, diantaranya tentang sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949, kisah sejarah seputar dikeluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang masih dipertanyakan kebenarannya. Hal ini dikarenakan rekonstruksi sejarah tersebut tidak sepenuhnya berasal dari arsip sebagai sumber primer, tetapi terkadang hanya bersumber dari kesaksian yang mengandalkan memori manusia, yang dalam pepatah dikatakan bahwa lidah tak bertulang, sehingga kebenarannya masih diragukan. Kalaupun menciptakan arsip masih bermuara pada kelemahan penyelamatan sehingga kita belum menyimpan dan menggunakan arsip sebagai sumber informasi. Padahal kekuatan besar rekonstruksi sejarah dapat diperoleh dari arsip sebagai pilar marwah bangsa, sehingga identitas bangsa dapat dikenali.

Wajah kearsipan, khususnya informasi pasca kemerdekaan yang berada di lembaga pemerintah sering sulit diketemukan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor : *pertama*, arsip – arsip musnah oleh bencana (kebakaran, perang, banjir, dan lain lain); *kedua*, arsip –arsip sengaja dimusnahkan untuk menghilangkan informasi penyimpangan jabatan, kewenangan , atau perilaku negatif lainnya, meski mereka sadar konsekuensi yang menghadangnya; *ketiga*, arsip –arsip dimusnahkan karena kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman atas hukum dan nilai penting arsip yang dimiliki bagi kepentingan bangsa secara luas. Kemungkinan seperti ini dilihat dari hasil pemantauan/ monitoring yang dilakukan Kantor Arsip Provinsi DIY ke instansi di lingkungan Pemerintah DIY, bahwa arsip –arsip yang dimiliki sebagian instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY tidak setua dengan usia lembaganya, meskipun mereka belum

pernah menyerahkan ke lembaga kearsipan (Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY); *keempat*, arsip – arsip diselamatkan oleh orang – orang yang tidak berhak namun sadar akan pentingnya arsip dengan alasan penyelamatan, walaupun akhirnya arsip – arsip tersebut juga tidak jelas keberadaannya.

Sadar akan pentingnya arsip , salah satu upaya menghindari terjadinya kekeliruan penyelenggaraan dan perlakuan semena–mena terhadap arsip. Sadar Arsip merupakan sikap mental peduli terhadap nilai dan manfaat arsip sebagai memori kegiatan baik perorangan maupun instansi untuk kemudian secara aplikatif mampu mengaktualisasikan kegiatan kearsipan menuju kearah terselamatkannya arsip sesuai dengan fungsi dan nilai gunanya. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai pegawai negeri DIY untuk menyelamatkan arsip-arsip yang ada disekitar kita agar kekeliruan penyelenggaraan kearsipan tidak terus terjadi. Dengan harapan baru sejarah DIY yang sebagian besar terekam dalam arsip-arsip di lembaga pemerintah akan dapat tersaji pada saat dibutuhkan dan dapat kira wariskan kepada generasi yang akan datang

Arsip adalah sumber informasi dan aset organisasi. Sebagai sumber, arsip menyediakan informasi, dan sebagai aset arsip menyediakan dokumentasi. Informasi yang paling valid , kredibel untuk pengambilan keputusan bersumber pada arsip dan bukan pada informasi lisan dari sebuah kata, kata si A, kata si B yang sangat subyektif.

Untuk membangun sadar arsip harus dimulai semenjak arsip – arsip itu diciptakan oleh seseorang ataupun instansi sampai arsip–arsip itu disimpan di Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY sebagai lembaga kearsipan di DIY. Kesadaran harus dibangun pada pribadi setiap manusia. Cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tidak harus sama dan terbuka tetapi harus sesuai dengan porsi dan fungsi masing – masing pegawai negeri, khususnya di DIY.

Sadar arsip bukan hanya monopoli arsiparis dan petugas kearsipan sebagai pengelola dan pengendali arsip di lingkungan Pemerintah DIY, akan tetapi perlu ditegakkan melalui pilar :

1. **Lembaga kearsipan**, Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY sebagai Pembina yang secara langsung bertanggung jawab menyelamatkan arsip –arsip dinamis inaktif maupun statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. Dalam perwujudannya, dengan segala kemampuan dan keterbatasan potensi yang ada di lembaga kearsipan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah :
 - a. Penetapan kebijakan pembinaan kearsipan dan pelestarian;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pada instansi di lingkungan pemerintah DIY;
 - c. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan,
 - d. Melakukan pengkajian dan pengembangan sarana dan prasarana kearsipan;

- e. Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia seta pemasyarakatan kearsipan.
 - f. Pelestarian dan pemanfaatan arsip;
 - g. Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama dengan badan – badan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah DIY dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Setiap pegawai negeri, instansi pencipta arsip yang menangani arsip – arsip dinamis.** Pilar kedua ini mempunyai tanggung jawab yang signifikan dalam proses penyadaran arsip lingkup internal di instansi pencipta arsip. Tingkat sadar arsip di instansi pencipta arsip berbanding lurus terhadap cara memperlakukan arsip. Semakin rendah kesadaran terhadap arsip semakin buruk perlakuan terhadap arsip. Demikian sebaliknya, semakin tinggi tingkat pegawai negeri tersebut sadar arsip , maka makin baik perlakuan terhadap arsip yang diciptakannya. Karena itu bahwa apresiasi setiap pribadi dalam manajemen dari tingkat *top management* sampai *low management* adalah mutlak. Apresiasi pimpinan berpengaruh terhadap sadar arsip di tingkat bawah. Rendahnya apresiasi dan lemahnya sadar arsip mempercepat arus ketidakberdayaan sebuah instansi dalam menyelamatkan arsip yang diciptakan. Sudah tentu kualitas apresiasi dan sadar arsip ditentukan oleh aplikasi di lapangan , dan bukan hanya slogan belaka. Dengan demikian bangunan nilai sadar arsip dimulai ketika arsip diciptakan, mengingat masa tersebut merupakan awal sebuah proses manfaat informasi arsip dilalui, baik untuk kepentingan operasional maupun konsumsi peneliti.
 3. **Peran Pimpinan Pemerintah Tertinggi** sebagai penentu arah kebijakan yang melahirkan kemauan positif atas kearsipan di lingkungan Pemerintah DIY. Dalam perspektif itu terlihat bahwa faktor pemahaman penentu kebijakan terhadap kearsipan cukup signifikan mempengaruhi tumbuhnya sadar arsip maupun langkah penyelenggaraan kearsipan yang baik dan benar.
 4. Meski hanya bersifat pendukung adalah **suara peduli dari individu (pribadi), organisasi, atau lembaga yang kelak berkepentingan terhadap penggunaan arsip** sebagai bahan penelitian , termasuk diantaranya adalah para sejarawan. Meski disadari para peneliti hanyalah *user* dari arsip yang ada atau tersedia. Mereka tidak mempersoalkan mengapa arsip tidak ada atau tersimpan. Mereka hanya mengupas dan menganalisa informasi yang ada atau ditemukannya. Apabila informasi tertulis itu dianggap belum mencukupi, informasi dapat dicari melalui sumber lisan atau referensi lainnya. Namun informasi lisan sendiri tentu memiliki subyektifitas dan keterbatasan.

Keempat komponen tersebut secara simultan diperlukan perannya dalam upaya mewujudkan sadar arsip. Mengingat keempat komponen ini secara interaktif terkait

dalam sebuah obyek, yaitu arsip, walaupun dalam kepentingan yang berbeda.

Munculnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sampai pada manipulasi rekonstruksi sejarah, hilangnya bukti – bukti historis, kiranya dapat ditelusuri sebagai akibat tidak tertibnya administrasi yang disebabkan oleh ketidaksadaran dan tidak tertibnya penanganan dan pengelolaan informasi / arsip yang diciptakan.

Penutup

Gerakkan sadar arsip selayaknya dikumandangkan dan diwujudkan pada setiap Pegawai negeri maupun instansi dilingkungan Pemerintah DIY. Sudah saatnya kita membangun optimisme melalui sadar arsip. Dengan harapan bahwa penyelamatan, pelestarian arsip –arsip rekaman aktifitas sejarah DIY dapat terus dioptimalkan sehingga kita tidak perlu lagi mencari informasi di tempat lain. Dengan sadar arsip niscaya kepastian hukum, identitas bangsa, ataupun identitas budaya DIY dapat diselamatkan. Menumbuhkembangkan sadar arsip yang dirasa kurang bergairah meski terkesan latah, selayaknya pula pada saat ini merupakan titik awal untuk melakukan reformasi kearsipan di lingkunag penerintah DIY, membedah pagar –pagar penghalang tumbuhnya sadar arsip.

SELAMAT BEKERJA

Penulis : Anna Nunuk Nuryani, Dra

Arsiparis Muda di Kantor Arsip Daerah Provinsi DIY